



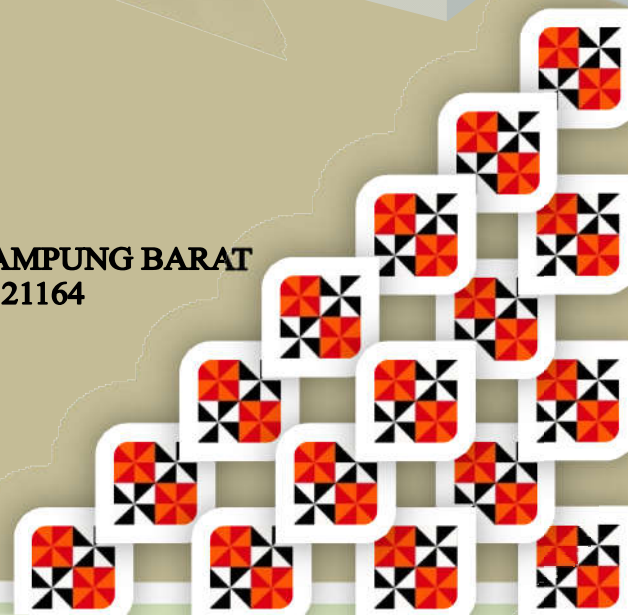
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) 2023-2026



JL. TULIP NO. 3 WAY MENGAKU LIWA LAMPUNG BARAT
TELP. (0728) 21164 FAX. (0728) 21164
KODE POS 34811

2023



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai yang kemudiannya dituangkan dalam Indikator Kinerja.

Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap perangkat daerah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan dan sasaran pemerintah daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis (RENSTRA) perangkat daerah maupun Rencana Kerja (RENJA) tahunan perangkat daerah yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan OPD yang bersangkutan, maka Pimpinan Perangkat Daerah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama dimana dalam pencapaian target indikator kinerja utama tersebut perlu dukungan oleh pencapaian kinerja individu-individu dalam satu organisasi.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat selaku Perangkat Daerah (PD) juga menetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2023-2026 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama perangkat daerah yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan Kestuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lampung Barat, disesuaikan dengan tujuan dan sasaran pemerintah daerah.

2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat

adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
12. Peraturan Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

2. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk mengukur capaian kinerja tiap individu didalam organisasi perangkat daerah dalam upaya mencapai target Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat;
3. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Lampung Barat sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik dengan fungsi perangkat daerah sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan tujuan dan sasaran strategisnya dengan mengacu kepada pernyataan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka merealisasikan tujuan pembangunan pemerintah daerah.

Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai empat tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Perumusan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

- Tujuan : Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat.
- Indikator Tujuan : Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama.
- Target Kinerja : - Tahun 2023 : Sangat Baik (84,10 poin).
- Tahun 2024 : Sangat Baik (84,15 poin).
- Tahun 2025 : Sangat Baik (84,20 poin).
- Tahun 2026 : Sangat Baik (84,25 poin).

Adapun sasaran yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai tujuan “Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat” yaitu :

Sasaran I : Menurunnya Konflik SARA

Indikator Sasaran : Persentase Pengurangan Konflik SARA.

Sasaran II : Meningkatnya kesadaran politik masyarakat

Indikator Sasaran : 1. Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi.
2. Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Suatu organisasi harus mempunyai susunan organisasi, tugas dan fungsi organisasi agar roda organisasi dapat berjalan dengan baik, oleh karena itu agar program dan kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan alurnya, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi kelompok jabatan fungsional.
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dimana dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi kelompok jabatan fungsional.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Adapun tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah melaksanakan urusan dibidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembuatan, dekonsentrasi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. Pelayanan administratif; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 30 Tahun 2022



3. Kebijakan Umum

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam perencanaan strategis tahun 2023-2026 tersebut perlu ditetapkan suatu kebijakan sebagai berikut :

- a. Pembinaan keragaman budaya dan kerukunan hidup antar-umat beragama;
- b. Meningkatkan pemahaman tentang ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, Kerukunan Umat Beragama, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, deteksi dini, radikalisme, bahaya narkoba dan pembauran kebangsaan;
- c. Pendidikan, pembinaan nilai-nilai pancasila;
- d. Pengembangan dan penguatan nilai-nilai dan implementasi rasa cinta tanah air;
- e. Meningkatkan dukungan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda);
- f. Memperkuat koordinasi antar lembaga melalui dukungan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial;
- h. Pendidikan, Pembinaan, Pengembangan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air;
- i. Meningkatkan Pembinaan dan penguatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Forum-Forum Masyarakat;
- j. Dana hibah bagi ormas terdaftar;
- k. Penyederhaan proses pendaftaran ormas;
- l. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan melibatkan : Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Forum-Forum Masyarakat, Tokoh Politik, Tokoh Masyarakat, dunia Akademisi, Pemuda, Mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat lainnya;
- m. Memperkuat citra positif institusi dan kelembagaan politik.

BAB IV
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Sesuai dengan tujuan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yaitu “Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Agamis, Berbudaya, Aman Dan Damai”, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan tujuan strategis perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah tersebut yaitu “Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat” dengan indikator Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama.

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai tersebut diatas, maka Sasaran Strategis dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah :

Sasaran I : Menurunnya Konflik SARA

Indikator Sasaran : Persentase Pengurangan Konflik SARA.

Sasaran II : Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat

Indikator Sasaran : 1. Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi.
2. Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah.

Adapun strategi dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut antara lain yaitu :

1. Memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila melalui pemanfaatan teknologi dan media digital;
2. Memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan dan cinta tanah air kepada masyarakat;
3. Memperkuat kohesivitas masyarakat melalui pengelolaan kerukunan warga;
4. Melakukan sosialisasi Gerakan Hidup Rukun;
5. Memperkuat pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Ormas;
6. Memberdayakan Ormas yang terdaftar di Kabupaten Lampung Barat;
7. Memperkuat kesadaran generasi muda untuk meningkatkan pemahaman demokrasi;
8. Meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi dengan melibatkan peran serta partai politik;

Tujuan Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-			
			2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat	Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama	(84.10) Sangat Baik	(84.15) Sangat Baik	(84.20) Sangat Baik	(84.25) Sangat Baik

**Sasaran Strategis Yang Menjadi Indikator Kinerja Utama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-			
			2023	2024	2025	2026
1	Menurunnya Konflik SARA	Persentase Pengurangan Konflik SARA	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi.	-	86%	-	-
		Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah	5,26%	5,54%	5,82%	6,09%

2. Indikator Kinerja Individu

Adapun langkah-langkah penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2023-2026 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat antara lain :

1. Tahap pertama.

Klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (result statement) atau tujuan/sasaran yang ingin dicapai untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penetapan indikator kinerja individu.

2. Tahap kedua.

Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Individu yang mungkin dapat digunakan berdasarkan program dan kegiatan yang diselaraskan dengan indikator kinerja utama.

3. Tahap ketiga.

Melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Individu yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja.

4. Tahap keempat.

Memilih Indikator Kinerja Individu yang selaras dengan Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Maka sesuai Tujuan dan Sasaran Strategis diatas, Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023-2026 serta program dan kegiatan yang dilaksanakan maka Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2023-2026 yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat
- Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- Fungsi : a. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 b. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 c. Pembinaan teknis peyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan kesatuan bangsa dan politik; dan
 d. Pelaksaaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Program : 1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 2 Pengembangan Penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 3 Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 4 Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 5 Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
 6 Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Menurunnya Konflik SARA	Persentase Penurunan Konflik SARA	Jumlah potensi konflik SARA yang tidak menjadi peristiwa konflik SARA / Jumlah Potensi Konflik SARA x 100%	1. RPD 2023-2026 Kabupaten Lampung Barat
2	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi	Jumlah Masyarakat Yang Mengikuti Pesta Demokrasi / Jumlah Masyarakat Yang Mempunyai Hak Pilih x 100%	2. Renstra 2023-2026 Badan Kesbangpol LB
		Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah	Jumlah Ormas yang aktif / Jumlah Ormas Yang Ada di Kabupaten Lampung Barat x 100%	3. Kondisi dan Isu-isu strategis wilayah LB

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Barat,



BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
NIP. 197109241998031005

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat
- Tugas Pokok : Memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Fungsi :
- a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan
 - b. pelaksanaan tugas administrasi umum dan administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan dan kerumahtanggaan
 - c. pelayanan administrasi;
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkup Sekretariat dan lingkup Badan
- Program : 1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Hasil Evaluasi Inspektorat Kabupaten Lampung Barat	1. Laporan rutin/berkala perangkat daerah 2. Laporan kegiatan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Barat,



BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
NIP. 197109241998031005

Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Barat,



WAHYUDI HERU ISKANDAR, S.Sos., M.I.P
NIP. 197209172002121003

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- Jabatan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat
- Tugas Pokok Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing
- Fungsi
- Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
 - Penyusunan rencana dan program kerja di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan
 - Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan.
- Program
- Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
 - Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya peran Partai Politik dalam meningkatkan Etika dan Budaya Politik Partai Politik masyarakat	Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat	Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan politik dari partai politik / Jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan politik Tahun x 100	Laporan pelaksanaan kegiatan
2	Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktif	Jumlah Ormas yang terdata dan aktif / Jumlah Ormas yang Terdata x 100%	

Kepala Badan Kesbang dan Politik
Kabupaten Lampung Barat,



BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
NIP. 197109241998031005

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat,



PANGKU HAZARONI, S. Pd
NIP. 196609251998021006

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- Jabatan** : Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat
- Tugas Pokok** : Melaksanakan, sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan
- Fungsi** :
- a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama
 - b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama
 - c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan di bidang wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama
- Program** :
- 1. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
 - 2. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan masyarakat	Persentase pemahaman masyarakat terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan	Jumlah masyarakat yang paham tentang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan / Jml masyarakat yang mendapat pemahaman tentang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan x 100%	Laporan pelaksanaan kegiatan
2	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase menurunnya kasus penyakit masyarakat	Jumlah kasus penyakit masyarakat tahun N - Jumlah kasus penyakit masyarakat tahun N-1 / Jumlah kasus penyakit masyarakat tahun N x 100%	

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Barat,



BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
NIP. 197109241998031005

Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekososbudag
Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat,



SUMARLIN, S.I.Kom, M.E.Sy
NIP. 19780622 200212 1 010

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat
- Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelejen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik.
- Fungsi :
 a. Penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.
 b. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.
 c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan dibidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.
 d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.
- Program : 1 Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kewaspadaan aparaturnya dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat	Jumlah penanganan konflik sosial tahun N - penanganan konflik sosial N -1/ umlah penanganan konflik sosial tahun N x 100%	Laporan pelaksanaan kegiatan

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Barat,**



BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
NIP. 197109241998031005

**Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Barat,**



NAZORI, S.Sos
NIP. 19731001 200906 1 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- Jabatan : Fungsional Perencana (Subkordinasi Bidang Program Anggaran dan Keuangan) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat
- Tugas Pokok : Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang sub bagian program anggaran dan keuangan
- Fungsi :
 a. Pengelolaan penyusunan program dan anggaran
 b. Pengelolaan keuangan
 c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
- Program : 1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan : 1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Subkegiatan : 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 7 Evaluasi kinerja perangkat daerah
 8 Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
 9 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 10 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 11 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1.	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banyaknya dokumen Perencanaan yang disusun	1. Laporan rutin/berkala kegiatan
2.	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Banyaknya dokumen penganggaran yang disusun	2. DPA
3.	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Banyaknya dokumen penganggaran yang disusun	3. Laporan pelaksanaan kegiatan
4.	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Banyaknya dokumen penganggaran yang disusun	
5.	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Banyaknya dokumen penganggaran yang disusun	

1	2	3	4	5
6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banyaknya dokumen evaluasi kinerja yang disusun	
7	Tertaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Banyaknya dokumen evaluasi kinerja yang disusun	
8	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Banyaknya Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
9	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Banyaknya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	
10	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Banyaknya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
11	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Banyaknya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Barat,**

BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
NIP. 197109241998031005

**Perencana Ahli Muda
Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Barat,**

MUCLISUN, S.IP., M.M.
NIP. 197901252002121003

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- Jabatan Fungsional Perencana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat
- Tugas Pokok Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang sub bagian program anggaran dan keuangan
- Fungsi a. Pengelolaan penyusunan program dan anggaran.
 b. Pengelolaan keuangan
 c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan
- Program 1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan 1. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 2. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Subkegiatan 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 2. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 6. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 8. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 9. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 12. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Banyaknya Dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD yang disusun	1. Laporan rutin/berkala atas pelaksanaan kegiatan
2	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Banyaknya Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang disusun	2. Data sumber daya perangkat daerah

1	2	3	4	5
3	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	Banyaknya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
4	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	Banyaknya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
5	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	Banyaknya Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
6	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Banyaknya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang disusun	
7	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banyaknya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang disusun	
8	Terlaksananya kegiatan surat-menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disusun	
9	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Banyaknya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
10	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Banyaknya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
11	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Banyaknya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	
12	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Banyaknya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	
13	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/	Banyaknya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Barat,

BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
NIP. 197109241998031005

Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung Barat,

ELDA, SH
NIP. 197008052008012020

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- Jabatan : Fungsional Analis Kebijakan (Sub Koordinasi Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat
- Tugas Pokok : Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
- Fungsi :
 a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan
 b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
 c. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan
 d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan
- Program : 1. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
- Kegiatan : 1. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Subkegiatan : 1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Tertaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Banyaknya masyarakat yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan pelaksanaan kegiatan
2	Tertaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Banyaknya yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Barat,



BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
NIP. 197109241998031005

Analis Kebijakan Ahli Muda
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat,



PEGA YANTI, S.IP
NIP. 197904232007012005

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

- Jabatan : Fungsional Analis Kebijakan (Sub Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat
- Tugas : Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama
- Fungsi :
 - Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di sub bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama
 - Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di sub bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.
 - Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di sub bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama.
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di sub bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama
- Program : 1 Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya
- Kegiatan : 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.
- Subkegiatan :
 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Kebangsaan.
 - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dan Penghayat Kepercayaan di Daerah. Kebangsaan.

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Banyaknya Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, di Daerah	Laporan pelaksanaan kegiatan
2	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Banyaknya Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Sosial dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
3	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Banyaknya Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Barat,

BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
NIP. 197109241998031005

Analis Kebijakan Ahli Muda
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat,

SYUBBAL FATHON, SH.I
NIP. 197504232007012005

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Jabatan : Fungsional Analis Kebijakan (Sub Koordinasi Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat

Tugas Pokok : Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen

- Fungsi :
- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen
 - c. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen.
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen.

Program : 1 Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan : 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

- Subkegiatan : 1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.
- 2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Banyaknya Orang yang Mengikuti Koordinasi Kewaspadaan Dini serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan pelaksanaan kegiatan
2	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Banyaknya Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Barat,**



BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
NIP. 197109241998031005

**Analisis Kebijakan Ahli Muda
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat,**



YUZIR, SE
NIP. 197211251993031006

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Jabatan : Fungsional Analis Kebijakan (Sub Koordinasi Bidang Penanganan Konflik) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat

Tugas Pokok : Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang penanganan konflik

- Fungsi
- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang penanganan konflik
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang penanganan konflik
 - c. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang penanganan konflik
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanganan konflik

Program : 1 Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan : 1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Subkegiatan : 1 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan kegiatan

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Barat,**



BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
NIP. 197109241998031005

**Analis Kebijakan Ahli Muda
Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Lampung**



RINA WATI, S.IP
NIP. 198405272009022008

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Jabatan	Fungsional Analis Kebijakan (Sub Koordinasi Bidang Politik Dalam Negeri) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat
Tugas	Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang politik dalam negeri
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di politik dalam negeri Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang politik dalam negeri Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang politik dalam negeri Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang politik dalam negeri
Program	1 Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
Kegiatan	1 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum
Subkegiatan	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Banyaknya orang yang mengikuti diklat dan menjadi tim desk pemantauan pelaksanaan pesta demokrasi (Pemilu dan Pilkada)	Laporan pelaksanaan kegiatan
2	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Banyaknya orang yang mengikuti kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi	
3	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Banyaknya Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Barat,**



BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
NIP. 197109241998031005

**Analisis Kebijakan Ahli Muda
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat,**



MERI ANTONI, S.H., M.M.
NIP. 198205062008011013

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

Jabatan : Fungsional Analis Kebijakan (Sub Koordinasi Bidang Organisasi Kemasyarakatan) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat

Tugas Pokok : Menyiapkan bahan dalam rangka membantu melaksanakan penjabaran kebijakan teknis di bidang organisasi kemasyarakatan

- Fungsi :
- a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang organisasi kemasyarakatan.
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang organisasi kemasyarakatan
 - c. Penyiapan bahan penyelenggaraan kegiatan di bidang organisasi kemasyarakatan.
 - d. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang organisasi kemasyarakatan

Program : 1 PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Kegiatan : 1 PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

- Subkegiatan :
- 1 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.
 - 2 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.


NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Jumlah dokumen kebijakan bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas dan Pengawasan Ormas yang Disusun	Laporan pelaksanaan kegiatan
2	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Banyaknya Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing.	

**Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Barat,**



BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
NIP. 197109241998031005

**Analis Kebijakan Ahli Muda
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat,**



ANWAR SANI HALIK, SH., M.M.
NIP. 197906032010011004

BAB V

PENUTUP

Penetapan indikator merupakan salah satu upaya dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan yang digunakan baik oleh para pelaksana maupun pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi agar mencapai hasil dan berkinerja tinggi. Dengan memperhatikan kriteria penetapan indikator kinerja yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang dapat diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur, maka diharapkan penetapan indikator ini dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja organisasi. Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat ini, didasarkan pada Tujuan, Sasaran serta arah kebijakan umum Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 Kabupaten Lampung Barat. Dari adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2023-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat menjadi acuan dan arah kebijakan perangkat daerah dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197109241998031005